BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perang antara Rusia-Ukraina yang sudah bergulir sejak November 2021 menarik atensi internasional. Sebuah citra satelit menunjukan adanya pergerakan dari Rusia yang melakukan penumpukan baru pasukan Rusia di wilayah perbatasan Ukraina. Intelijen barat pada saat itu menyebut Rusia akan melakukan penyerangan terhadap Ukraina dan mereka meyakini bahwa Moskow juga turut memobilisasi sekitar seratus ribu tentara beserta tank dan perangkat lainnya (Adha & Sayyidul, 2022). Namun Rusia sempat menyangkal hal ini, Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin memberikan pengumuman berupa pengakuan kemeredekaan milisi Donbas, Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, Pada tanggal 24 Februari 2022, Putin secara tiba-tiba mengumumkan akan melaksanakan "operasi militer" (Bascillar dkk, 2022). Serangan atau yang bisa disebut sebagai invasi ini dilakukan di sejumlah kota yang mana hal ini melanggar kedaulatan negara lain. Penyerangan terhadap Ukraina ini dimulai ketika Rusia tidak setuju dengan pergerakan Ukraina yang lebih dekat ke Barat dan ingin menjadi bagian dari NATO. Melihat sejarah yang pernah ada, Rusia dan Ukraina pernah mempunyai hubungan yang cukup baik, namun Ukraina ingin mendekatkan diri kepada NATO dan menjadi anggotanya dikarenakan tindakan Rusia itu sendiri. Menurut Ukraina, dengan menjadi anggota NATO maka hal ini pasti membawa dampak secara signifikan dalam meningkatkan dukungan militer bagi Ukraina dari pihak luar, termasuk Amerika Serikat (HC3, 2022). Ukraina ingin meminta perlindungan pada NATO dari ancaman Rusia yang sewaktu-waktu bisa saja menyerang Ukraina yang telah terjadi ini.

Melihat hal ini Rusia tak hanya tinggal diam, Rusia menyiapkan pasukan militer untuk melakukan penyerangan terhadap Ukraina demi keamanan negaranya. Setelah penyerangan itu terjadi, hal ini ternyata menyebabkan warga sipil Ukraina menjadi target penyerangan Rusia. Masyarakat Ukraina mendapat tekanan yang sangat besar ketika pasokan listrik dan air mulai menipis. Serangan yang diberikan oleh Rusia telah merusak infrastruktur vital yang menunjang kehidupan warga sipil Ukraina salah satunya ialah pembangkit listrik. Jika pembangkit listrik di Ukraina dihentikan maka hampir dapat dipastikan penduduk Ukraina terpaksa bertahan hidup tanpa adanya akses listrik, terlebih suhu rata-rata di Ukraina mencapai kisaran 0 (nol) derajat celcius. Hal ini bisa berujung fatal hingga dapat menyebabkan kematian massal akibat hipotermia (Sakti, 2022). Menurut Hukum Humaniter Internasional, perang ini telah melanggar aturan perang internasional dikarenakan telah menjadikan warga sipil sebagai sasaran perang sehingga menyebabkan timbulnya krisis kemanusiaan seperti kelaparan dan kedinginan akibat musim dingin. Lumpuhnya pasokan listrik dan air di Ukraina menandai awal mula krisis kemanusiaan yang terjadi.

Aturan perang berdasarkan Hukum Humaniter Internasional tercantum pada Konferensi Den Haag (1907) membahas tentang batasan-batasan yang harus dilakukan saat terjadinya perang, mulai dari cara berpakaian para pasukan yang dibedakan dengan warga sipil, segala tindak pengrusakan, pembunuhan, dan penghancuran harus dibatasi sesuai dengan kebutuhan militer dan bahkan sasaran militer yang bisa dibom dan dihancurkan juga dibatasi. Bahkan tawanan perang harus dilindungi dan tidak boleh dianiaya begitu juga warga sipil atau korban perang (Sudaryanto, 2018). Hukum Humaniter Internasional mencangkup seluruh peraturan internasional yang melindungi HAM warga sipil, tentara yang terluka, tawanan perang, dan tim medis selama perang atau konflik bersenjata. Hukum perang dapat dibedakan menjadi dua yaitu Jus ad Bellum dan Jus in Bello yang mengatur perizinan dalam penggunaan senjata kekerasan yang sah dan membatasinya serta hukum yang berlaku saat perang yang mengacu pada seperangkat aturan yang mengatur perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perang atau konflik bersenjata (Sulistia, 2021).

Seiring menguatnya urgensi krisis kemanusiaan yang terjadi, bantuan

kemanusiaan yang disalurkan untuk korban perang di Ukraina justru terjebak dalam pusaran politik kepentingan Rusia yang kemudian berdampak pada terciptanya kesepakatan jalur aman kemanusiaan atau yang disebut sebagai Humanitarian Corridors. Kesepakatan ini merupakan resolusi yang dikeluarkan secara sah oleh Majelis Umum UN dan Aktor Internasional lainnya pada sidang darurat di Markas UN dan merupakan resolusi pertama tentang situasi kemanusiaan di Ukraina yang berhasil diadopsi oleh UN. UN menganggap ini adalah salah satu dari beberapa bentuk jeda sementara konflik bersenjata yang terjadi (DW, 2022). Humanitarian Corridors atau jalur aman pada dasarnya adalah kesepakatan antara pihak-pihak dalam konflik bersenjata untuk memungkinkan jalur aman untuk waktu yang terbatas di wilayah geografis tertentu. Hal ini dapat berupa perizinan warga sipil untuk pergi, bantuan kemanusiaan untuk masuk atau mengizinkan evakuasi yang terluka, sakit, atau mati (ICRC, 2022).

Menurut pasal 70 (1) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, persetujuan negara diperlukan untuk bantuan IAC (International Armed Conflict) tetapi tidak dapat ditahan secara sewenang-wenang. Humanitarian Corridors memiliki kapasitas untuk memberikan dampak parsial terhadap kewajiban pihak-pihak yang berperang dibawah naungan HHI khususnya, terkait dengan pengiriman pasokan, perlatan dan personel bantuan medis, dan pengiriman bahan makanan penting. Pasal 23 Konvensi Jenewa IV menyatakan bahwa pihak-pihak yang berperang atau berkonflik harus mengizinkan lewatnya kiriman medis dan rumah sakit serta benda-benda yang diperlukan (Matias, 2022).

Bascillar dkk (2020) menyatakan dalam tulisannya membagikan sebuah sudut pandang "Buradan yola çıkarak özellikle insani kriz boyutunda oluşan insani koridorlarda hedef ülkelerin gerekli tedbirleri almalarının yaşanabilecek hak ihlallerini asgari düzeye indireceği değerlendirilmektedir" (Dari sudut pandang ini, dinilai bahwa penting mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam koridor kemanusiaan yang terbentuk terutama dalam dimensi krisis kemanusiaan yang akan meminimalkan kemungkinan pelanggaran hak).

Urgensi dari meningkatnya krisis kemanusiaan merupakan isu penting yang harus diteliti dalam bidang hubungan internasional. Krisis kemanusiaan menjadi tantangan besar dunia internasional saat ini karena masih banyak negara-negara di dunia yang mengalami krisis kemanusiaan. Tetapi, dalam hal ini penulis lebih berfokus pada krisis kemanusiaan pada korban akibat perang Rusia-Ukraina dikarenakan infrastruktur yang telah luluh lantak. Kondisi perang ini membuat warga Ukraina terkepung sebab militer Rusia masih banyak yang menduduki puluhan wilayah di seluruh penjuru Ukraina. Takut akan serangan tiba-tiba Rusia yang bisa datang sewaktu-waktu tanpa persiapan dari warga sipil, mereka pun memilih untuk tinggal di Bungker atau pengungsian yang dirasa lebih aman ini disebabkan nyaris 500 saudara sebangsa mereka yang tewas akibat serangan artileri Rusia yang menyasar kompleks perumahan sipil (Bascillar dkk, 2022).

Rusia dan Ukraina melakukan perundingan yang dimana Ukraina sendiri menaruh harapan pada hasil perundingan antara delegasi dari kedua belah negara, namun perundingan yang diselenggarakan dianggap masih belum menemukan hasil atau solusi terbaik untuk kedua belah pihak walaupun secara terbuka telah menyatakan ingin mengakhiri konflik. Belum ada kesepakatan yang jelas diantara kedua belah negara. Sebelum masuk pada resolusi Humanitarian Corridors, Rusia dan Ukraina memiliki kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan ini tidak bertahan lama, di kota Mariupol pasukan militer Ukraina dan Rusia pun saling bertukar peluru dan membuat kedua negara saling tuding terkait pihak yang melanggar perjanjian terlebih dahulu. Pecahnya perjanjian gencatan senjata yang disepakati ini menujukan bahwa tidak ada jaminan untuk kedua belah pihak untuk tidak melanggar janji yang telah disepakati bersama (Bascillar dkk, 2022).

Banyak sekali penyaluran bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh aktor internasional namun beberapa diantaranya masih mengalami kendala dan hambatan karena masih terjebak pada pusaran politik kepentingan Rusia. Dimana perang ini dapat menyebabkan membesarnya dampak negatif pada perekonomian global. Banyak pihak yang berasumsi dengan diberikannya sanksi ekonomi dapat membuat Rusia segera kehabisan amunisi perang namun, sanksi ekonomi pada bidang migas justru memperkuat Rusia dalam membiayai perang.

Berikut diantaranya beberapa bantuan yang diberikan pada korban perang Rusia-Ukraina (Kompas, 2022) di antaranya yaitu:

UNICEF: Memberikan 62 ton bantuan berupa peralatan medis hingga mainan untuk mengurangi trauma pada anak-anak korban perang.

UNI EROPA: Memberikan 98 juta Euro dalam bentuk makanan, air, peralatan medis, shelter tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya yang dibutuhkan korban perang dikarenakan infrastruktur yang rusak.

British Red Cross: Menyediakan makanan, pakaian hangat dan bantuan kebutuhan dasar lain, terutama yang tinggal di barak pengungsian yang telah disediakan.

British Government: Memberikan 140 juta poundsterling untuk bantuan logistik dan bantuan pinjaman finansial untuk pemerintah Ukraina sebesar 500 juta pounsterling.

Tak hanya itu, UN sebagai pihak mediasi dan beberapa organisasi internasional seperti World Health Organization (WHO), World Food Programe (WFP), dan juga International Comittee of the Red Cross (ICRC), dsb memberikan bantuan praktis dengan turun kelapangan untuk memberikan bantuan keselamatan untuk korban perang. ICRC adalah salah satunya yang menunjang terciptanya jalur aman kemanusiaan atau Humanitarian Corridors. Humanitarian Corridors tidak memiliki definisi hukum yang konsisten namun, Humanitarian Corridors didefinisikan dan dicirikan oleh ruangnya yang sangat terbatas dan sempit, yang membedakannya dengan proyek-proyek kemanusiaan yang ruang lingkupnya luas dan tidak terbatas (Hoffmann, 2020). ICRC sudah menerapkan cara keselamatan ini sebelumnya pada beberapa negara berkonflik (ICRC, 2022). ICRC pada Maret 2022 telah membantu memfasilitasi perjalanan

aman ribuan warga sipil melalui *Humanitarian Corridors* dari Sumy dan Mariupol ke lokasi lain di Ukraina.

Namun demikian, UN dan beberapa organisasi lainnya juga sudah turut menyalurkan bantuan kemanusiaan. ICRC juga sudah melakukan evakuasi warga sipil melalui Humanitarian Corridors dibeberapa wilayah sesuai dengan kesepakatan kedua belah negara. Walaupun Humanitarian Corridors ini bukan merupakan solusi yang ideal, saat ini hanya cara ini yang dapat meminimalkan korban perang Rusia-Ukraina. Hambatan yang dialami selama melakukan evakuasi dengan pola yang rumit ternyata bukan hal yang mudah untuk dilewati. Bercermin pada kasus-kasus sebelumnya yang pernah Humanitarian Corridors seperti evakuasi warga sipil yang terluka di Ossetia Selatan pada tahun 2008, gencatan senjata harian di Ghouta Timur Suriah tahun 2018, membantu populasi di wilayah Tigray Ethiophia tahun 2021. Hal ini membutuhkan kehati-hatian di dalam praktik implementasinya tanpa mengabaikan atau meremehkan kekhususan kontekstual (L'Homme, 2022). Konsekuensi politikdari ikut serta dalam evakuasi warga harus dipertimbangkan dengan hati-hati, baik dari segi prospek mereka untuk kembali maupun segi implikasi evakuasi semacamitu bagi mereka yang tertinggal.

Beberapa hal yang menjadi konsentrasi Humanitarian Corridors yang menjadi penghambat dari pengimplementasian bantuan kemanusiaan diantaranya adalah akses yang terbatas, keamanan, koordinasi, dsb. Meskipun demikian, alternatif seperti Humanitarian Corridors adalah salah satu pilihan terakhir yang dapat digunakan atau dipilih dalam perang terbuka. Mungkin selalu menjadi pilihan yang sebisa mungkin untuk dihindari sebab terminologi dari Humanitarian Corridors cenderung memiliki ambiguitas yang mendalam dan kerentanannya terhadap eksploitasi politik serta rasa aman yang palsu. Tetapi, ini merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam keadaan darurat ketika warga sipil merasa tidak aman jika harus tinggal dan menetap. Evakuasi warga ke wilayah tertentu sesuai kesepakatan akan meminimalisasi korban perang (L'Homme, 2022).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan penjelasan dalam rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini memuat pembahasan mengenai "Apa penyebab hambatan ICRC sebagai representasi *Humanitarian Corridors* dalam membantu korban perang Rusia-Ukraina?".

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penyebab dari hambatanhambatan Humanitarian Corridors dalam membantu korban perang Rusia-Ukraina

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang membahas tentang Hambatan Humanitarian Corridors dalam membantu korban perang Rusia-Ukraina, adapun manfaat atau kegunaan dari adanya penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi penulis dalam mengimplementasikan pengetahuan pada kajian politik dan HAM, serta menjadi salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam program studi Hubungan Internasional, Universitas Amikom Yogyakarta.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam khazanah ilmu pengetahuan studi Hubungan Internasional dalam lingkup bantuan kemanusiaan yang diberikan pada korban perang Rusia-Ukraina. Sehingga dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya dengan kasus dan isu fenomena serupa.

3. Bagi Civitas

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi pustaka keilmuan di Universitas Amikom Yogyakarta, serta membantu para civitas Hubungan Internasional yang akan melakukan penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

BABI: PENDAHULUAN

Menyajikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang akan menjadi bagian pembuka dan pengantar dalam kajian dan penelitian yang dibahas dalam skripsi ini.

- 1.1 Latar Belakang Masalah
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Manfaat Penelitian

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai landasan teoritik dalam penelitian dan mengkomprasi tentang perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis.

- 2.1 Landasan Teoritis
- 2.2 Penelitian Terdahulu

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menguraikan metode penelitian, serta teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menunjang pembuatan kajian penelitian yang relevan.

- 3.1 Metode Penelitian
- 3.2 Teknik Pengumpulan Data

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguraikan hasil dan pembahasan yang menjawab pertanyaan riset yangmenjadi pusat penelitian, data, serta argumentasi pakar dan penulis.

- 4.1 Dampak Insentif dan Inefisiensi Biaya Perang dan Kemanusiaan Rusia-Ukraina
 - 4.1.1 Insentif

- 4.1.2 Inefisiensi Biaya Perang dan Kemanusiaan Rusia-Ukraina
- 4.2 Peran ICRC dalam melakukan Humanitarian Corridors pada KonflikRusia-Ukraina
 - 4.2.1 Faktor Penghambat ICRC sebagai representasi HumanitarianCorridors dalam konflik Rusia-Ukraina

BAB V : PENUTUP

Memaparkan kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan.

